

Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu

Faijah Mardiah¹, Jihadul Islami², Muhamad Fikri Irawan³, Inka Nusamuda Pratama⁴

^{1,2,3,4}, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram,

[1faijahmardiah@gmail.com](mailto:faijahmardiah@gmail.com) [2jihadhad991@gmail.com](mailto:jihadhad991@gmail.com) [3fikriirawan118@gmail.com](mailto:fikriirawan118@gmail.com)

[4inka.nusamuda@ummat.ac.id](mailto:inka.nusamuda@ummat.ac.id)

Keywords:

Impact,
Poverty,
Welfare,
Economy,
Empowerment,

Abstract: This article aims to examine the impact of poverty on the people of Dompu district. The topic focuses on the process of assessing the impact of poverty on the people of Dompu Regency. In order to approach this topic, we used a type of research approach in the form of a literature study (Library Research). This research uses a literature study research approach by reading, analysing and recording things related to the problem under study. This study concludes the impact of poverty on the people of Dompu Regency. Poverty is the lack of income or use sufficient to fulfil the minimum or basic needs of life, including basic needs such as food, shelter, clean water, education and health. Poverty needs to be reviewed, as it can lead to a range of problems that threaten people's welfare, such as lack of education, poor health, low income, and unemployment. Poverty can also cause conflict and social injustice, which threatens unity, populism, and can also affect the environment, which can lead to economic crises and lower welfare. Poverty reduction requires synergy between the government, the community, and other parties, who can make efforts to empower the community, develop the economy, and improve welfare. Government policy in any dimensional framework must be intentional or not, as it is called in the context of Indonesia, which has a vast territory and various poverty problems. Therefore, it is necessary to review or analyse the impact of poverty, especially on the people of Dompu Regency.

Kata Kunci:

Dampak,
Kemiskinan,
Kesejahteraan,
Ekonomi,
Pemberdayaan

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat Kabupaten Dompu. Topik difokuskan pada bagaimana proses peninjauan dampak dari kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat Kabupaten Dompu. Guna mendekati topik ini dipergunakan kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi pustaka yaitu dengan membaca, menelaah dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kajian ini menyimpulkan dampak kemiskinan dari masyarakat Kabupaten Dompu. Kemiskinan adalah kekurangan pendapatan atau penggunaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimum atau pokok, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, papan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan perlu di tinjau, karena kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengancam kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pendidikan, kesehatan buruk, rendahnya pendapatan, dan pengangguran. Kemiskinan juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan sosial, yang mengancam persatuan, kerakyatan. dan juga dapat mempengaruhi lingkungan, yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan kesejahteraan yang lebih rendah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan kesinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain, yang dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah dalam kerangka dimensi apapun harus disengaja atau tidak, sebagaimana yang disebut dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah yang luas dan berbagai

masalah kemiskinan. Maka dari itu perlu dilakukan peninjauan atau analisis dari dampak kemiskinan tersebut khususnya pada masyarakat Kabupaten Dompu.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



----- ◆ -----

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau saat ini, sekitar 6000 di antaranya berpenghuni. Pulau-pulau tersebut dibagi menjadi 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status berbeda-beda. Terdapat 98 kota dan 403 kabupaten di provinsi ini. Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda dengan 742 bahasa dan dialek berbeda yang digunakan oleh penduduk asli. (BPS, 2023). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan sosial yang pelik, seperti kemiskinan dan kemacetan transportasi. Permasalahan seperti ini sering muncul di negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. (Tri Yunarni et al., 2019)

Setiap negara di dunia, terutama negara berkembang, menganggap kemiskinan sebagai masalah utama. Pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhir setiap negara. Menurut (Ibrahim & Pratama, 2024) Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting karena tendensinya yang semakin meningkat dan konsekuensinya yang mencakup masalah ekonomi, sosial, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama. Ini berlaku baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. (Pratama, Citra, 2019)

Kemiskinan adalah ketidakberhasilannya fungsi beberapa kemampuan dasar atau dengan perkataan lain seseorang dikatakan miskin jika mengalami kesusahan untuk mencapai/mendapatkan kemampuan dasar ini. Sen menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah low income, tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan capability handicap (Pratama, 2023)

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang masih perlu diperhatikan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sering kali dianggap serius (Pratama, 2023). Namun kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik yang belum tuntas di Indonesia terkhusus di Kabupaten Dompu Provinsi NTB.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pascakemerdekaan hingga saat ini. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach. Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (Fardi et al., 2023)

Kemiskinan memiliki dampak negatif yang mengancam kesejahteraan masyarakat, termasuk pengurangan kualitas sumber daya manusia, produktivitas rendah, kesehatan buruk, dan pengangguran. Kemiskinan di Kabupaten Dompu dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengancam kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pendidikan, kesehatan buruk, rendahnya pendapatan, dan pengangguran. (Nurrahmania, 2020)

Kemiskinan juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan sosial, yang mengancam persatuan dan kerakyatan. Selain itu, kemiskinan juga dapat mempengaruhi lingkungan, yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan kesejahteraan yang lebih rendah (Pratama et al., 2023). Penanggulangan kemiskinan memerlukan kesinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain, yang dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah dalam kerangka dimensi apapun harus disengaja atau tidak, sebagaimana yang disebut dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah yang luas dan berbagai masalah kemiskinan. (Nizar & Arif, 2023)

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki beberapa desa yang masih tertinggal, termasuk 4.982 desa sangat tertinggal dan 9.584 desa tertinggal. Kemiskinan penduduk (PO) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Persen) juga menjadi acuan rencana pembangunan Provinsi NTB. (*Www.Aktualita.Info*, n.d.)

Perkembangan ekonomi Kabupaten Dompu data tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan dari 2,95 persen menjadi 3,17 persen pertumbuhan ini berdasarkan rilis BPS tahun 2023 (Su'amah, 2023). Namun angka kemiskinan Dompu tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Fenomena peningkatan angka kemiskinan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu namun terjadi pada hampir diseluruh daerah se Indonesia. (*Www.Topikbidom.Com*, n.d.)

Dalam beberapa tahun ke depan, kemiskinan di Kabupaten Dompu disahkan akan mencapai 9 persen pada tahun 2026 (Hendayani, 2023). Dalam upaya mengurangi kemiskinan pemerintah telah mengembangkan beberapa infrastruktur, termasuk pelabuhan penyeberangab dan terminal khusus, serta sistem jaringan transportasi laut. Namun, masih banyak desa yang belum terjangkau infrastruktur ini, sehingga perlu diadakan penelitian dan upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dompu. (Bappeda, 2022)

Para peneliti jarang melakukan penelitian tentang Kemiskinan di Kabupaten Dompu seperti pada penelitian (Dulkiah & Nurjanah, 2018) Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung, berfokus mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh kemelaratan secara merata kriminalitas di Kota Bandung, kemudian penelitian kedua (Fajriwati, 2016) Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan berfokus pada perhatian pemerintah terhadap rakyat miskin harus diperhatikan lebih serius lagi dan dapat memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang banyak pengangguran diakibatkan tingginya perekonomian yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah. penelitian (Priseptian & Primandhana, 2022) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan berfokus mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2020 (Kartini, 2023). Maka dari itu penelitian ini berusaha mengisi gap pengetahuan yang berfokus pada MENINJAU DAMPAK KEMISKINAN YANG TERJADI

TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN DOMPU. Untuk mengetahui dampak kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat Kabupaten Dompus. Berfokus pada bagaimana dampak dari kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat Kabupaten Dompus.

B. METODE

Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi pustaka yaitu dengan membaca, menelaah dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Prayoga et al., 2023).

Menurut Danandjaja, Syafitri & Nuryono (2020) menyatakan bahwa, riset kepustakaan atau sering disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Moh.Nazir, 2005).

Menurut Crystallography (2016) penelitian kepustakaan adalah metode penelitian kualitatif yang tempat penelitiannya di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumen lainnya sebagai bahan penelitiannya (Lalu Irwan Jayadi, 2023).

Berdasarkan sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa studi literatur adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur Kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 agar hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Dompus pada bulan Maret 2023 sebesar 12,62 persen yang berarti mencakup 34,38 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Maret 2021 (12,40 persen atau 33,27 ribu jiwa), persentase penduduk miskin naik 0,22 persen. Namun secara umum dalam 11 tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Dompus telah mengalami penurunan utamanya pada tahun 2012-2020 dan berada di bawah angka Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Dompus mengalami penurunan antara tahun 2018 dan 2020, namun karena pandemi Covid-19 pada tahun 2021, persentase tersebut naik menjadi 12,60%. Namun pada tahun 2022, Kabupaten Dompus kembali menunjukkan tren yang baik dengan turunnya angka kemiskinan menjadi 12,40%. Meskipun demikian, melalui berbagai inisiatif yang dapat mendorong perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Dompus harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Dompus.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Kabupaten Dompu diatas Garis Kemiskinan Tahun 2018 - 2022

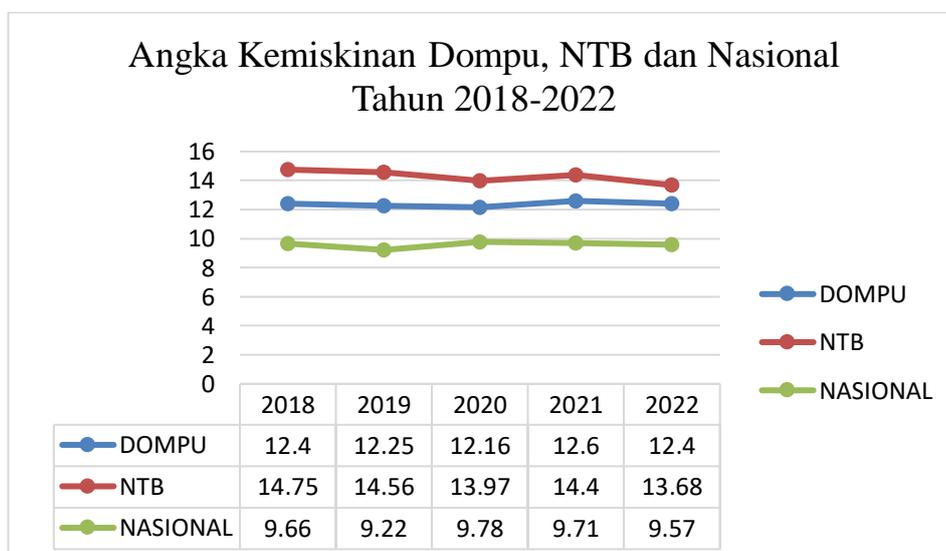
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	P1	P2	Garis Kemiskinan
2018	30,74	12,40	1,59	0,34	284.188
2019	30,81	12,25	1,62	0,35	328.740
2020	30,97	12,16	1,65	0,34	362.142
2021	33,26	12,60	1,33	0,25	370.120
2022	33,27	12,40	1,49	0,32	404.413

Sumber : (Data Diolah Penulis, 2024)

Kabupaten Dompu memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12,40 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,57 persen, tetapi lebih rendah dari tingkat kemiskinan 13,68 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah Kota Mataram dan Kota Bima, sebagai hasil dari pencapaian ini Kabupaten Dompu kini memiliki tingkat kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Definisi tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan berdasarkan pengeluaran. Individu dikategorikan miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita bulanan mereka berada di bawah jumlah tertentu yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) membentuk garis kemiskinan, GKM adalah pengeluaran makanan minimum per kapita per hari, atau 2.100 kilokalori.

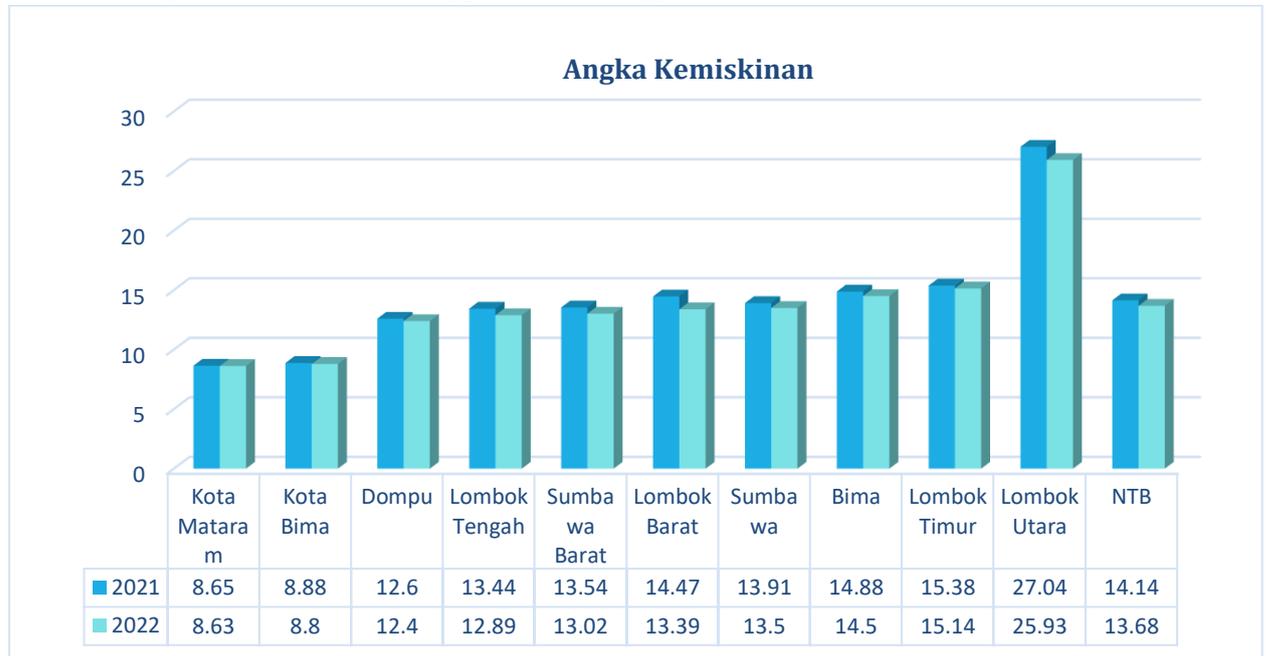
Temuan Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978, yang mengindikasikan bahwa hidup sehat membutuhkan rata-rata 2100 kilokalori per kapita per hari, menjadi dasar dari tingkat kecukupan pangan ini. Sebanyak 52 kategori (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain) membentuk paket komoditas kebutuhan pangan dasar ini. GKNM adalah singkatan dari angka kecukupan gizi minimal.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Dompu, NTB dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber : (Data diolah Penulis 2024)

Berdasarkan data tahun 2022, Kabupaten Dompu memiliki tingkat kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah Kota Mataram dan Kota Bima. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,63 persen, Kota Mataram memiliki tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima berada di urutan kedua dengan tingkat kemiskinan 8,80 persen, sementara Kabupaten Dompu berada di urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan 12,40 persen. Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Barat, yaitu 25,93%.



Gambar 1.2. Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan Tahun 2021-2022 Kabupaten Dompu dengan Kabupaten/Kota se NTB

Sumber : (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan data grafik diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara angka kemiskinan data terakhir yaitu tahun 2021(12,6) dengan angka kemiskinan tahun 2022 (12,4) di kabupaten Dompu mengalami sedikit penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB tidak terlalu buruk. Terlihat pada grafik diatas bahwa kabupaten Lombok Utara menempati angka kemiskinan tertinggi dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Sedangkan Kabupaten Dompu memiliki angka kemiskinan paling sedikit ketiga setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Dampak Kemiskinan

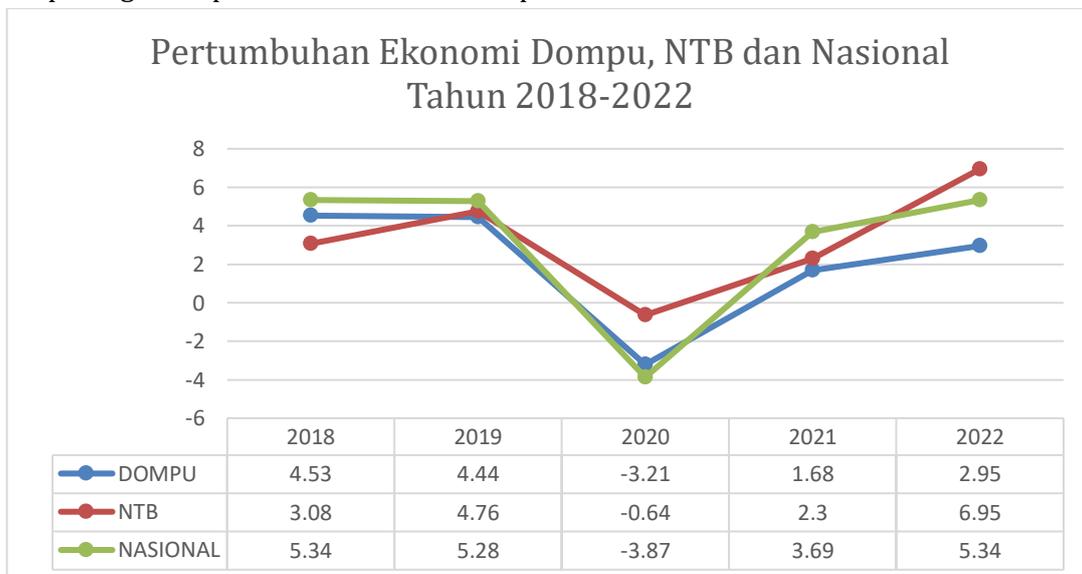
Hasil penelitian yang mengkaji dampak kemiskinan terhadap masyarakat di Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Dampak kemiskinan di Kabupaten Dompu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan di Kabupaten Dompu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya seperti, Terbatasnya akses terhadap infrastruktur, terbatasnya akses terhadap pasar, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Pembatasan ini mempersulit masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan. keterbatasan akses terhadap imfrastruktur, misalnya menghambat mobilitas dan distribusi

barang, yang pada gilirannya menghalangi pertumbuhan usaha lokal. Demikian pula, kurangnya akses pasar membuat produsen lokal sulit menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, sementara kurangnya pendidikan dan keterampilan membatasi peluang kerja yang lebih baik bagi penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, yang dihitung menggunakan angka PDRB harga konstan, menunjukkan perkembangan total pendapatan daerah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kemajuan dan percepatan dalam proses pembangunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan dalam perekonomian daerah tersebut. Di Kabupaten Dompu, keterbatasan sumber daya ini tidak hanya memperburuk kondisi kemiskinan tetapi juga menekan laju pertumbuhan ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, pasar yang terjangkau, dan pendidikan yang memadai, sulit bagi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan, perlu adanya investasi signifikan dalam infrastruktur, akses pasar, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan.



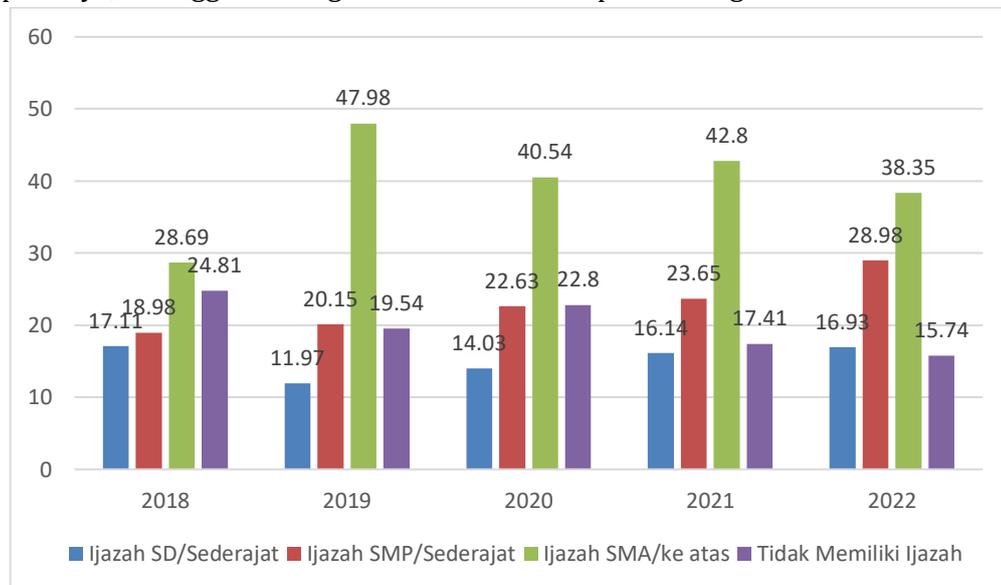
Gambar 1.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu Tahun 2023

Selama kurun waktu 2018 - 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu berada diatas pertumbuhan Provinsi NTB dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,53 persen namun dibawah pertumbuhan nasional. Adapun pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada dibawah pertumbuhan provinsi NTB maupun nasional. Pada Tahun 2020 ketika pandemic Covid 19 mewabah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu mengalami kontraksi yang cukup tajam yaitu minus 3,21 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tumbuh positif yaitu 1,68 persen dan perlahan membaik hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu menunjukkan persentase pertumbuhan sebesar 2,95 persen meskipun masih berada dibawah pertumbuhan Provinsi NTB maupun Nasional.

2. Terbatasnya akses terhadap pendidikan

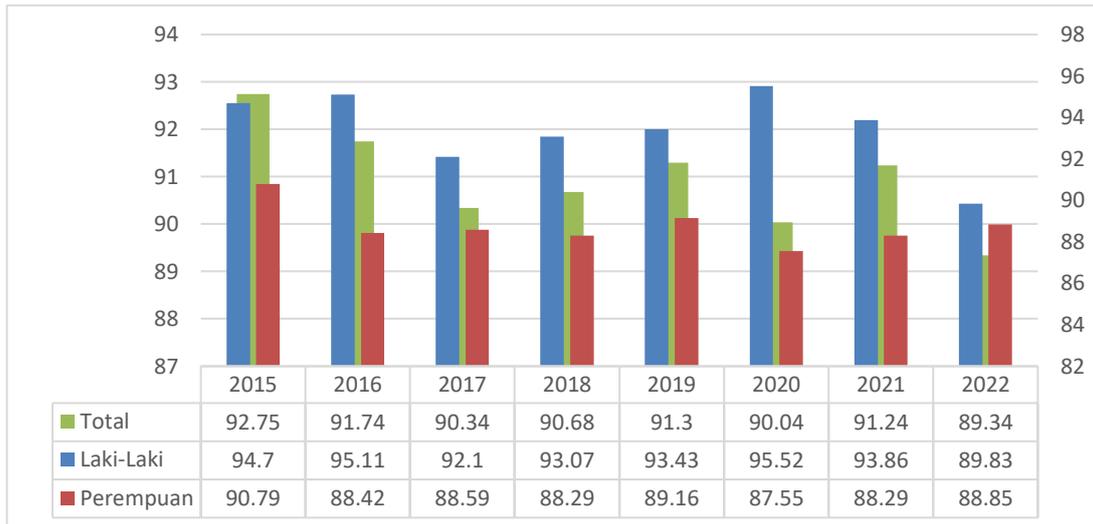
Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Dompu. Terbatasnya akses terhadap pendidikan berarti masyarakat tidak diberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan.



Grafik 1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kab. Dompu Tahun 2018-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu 2023

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kualitas SDM yang dimiliki dan diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada Tahun 2022, diketahui 15,74 persen penduduk berumur 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah SD, 16,93 persen lulusan SD/Sederajat, 28,98 persen berhasil lulus SMP/Sederajat, dan 38,35 persen mempunyai ijazah SMA/ke atas termasuk yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Dompu masih rendah dan perlu upaya keras dari Pemerintah Daerah untuk mendorong minat penduduk Kabupaten Dompu mengenyam pendidikan semakin tinggi dengan mengikuti program A/B/C.

Salah satu keberhasilan pembangunan di Bidang Pendidikan juga adalah ditujukan untuk menurunkan tingkat buta huruf penduduk. Angka melek huruf dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia. Semakin tinggi Angka Melek Huruf penduduk suatu wilayah, maka semakin tinggi pula mutu SDM-nya. Indikator ini menunjukkan banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas.



Grafik 1.5. Angka Melek Huruf Kab. Dompu Tahun 2015-2022

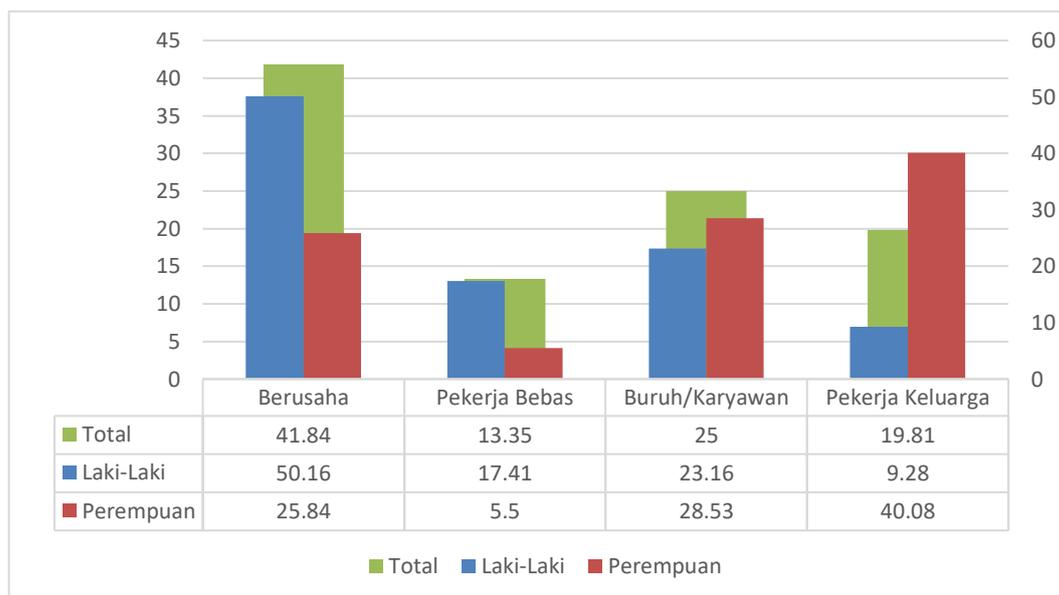
Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Grafik diatas memperlihatkan secara umum penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis melek huruf. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2022 Angka Melek Huruf Kabupaten Dompu bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Dompu tercatat sebesar 89,34 persen dengan komposisi persentase penduduk laki-laki lebih besar dari Perempuan masing-masing sebesar 89,83 persen dan 88,85 persen. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas masih terdapat 11-12 orang yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin pada Tahun 2022.

Persentase Angka Melek Huruf penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan dibanding laki-laki. Namun dilihat lebih jauh hal ini dapat diakibatkan beberapa faktor, diantaranya dikaitkan dengan Usia Harapan Hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sehingga tingginya angka buta huruf perempuan umumnya berasal dari penduduk usia tua yang memang akses untuk bersekolah sangat sulit untuk itu.

3. Terbatasnya Akses Terhadap Pekerjaan

Terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Dompu. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan.



Grafik 1.5. Persentase Status Pekerjaan Utama Menurut Jenis Kealamin Kabupaten Dompu Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data persentase status pekerjaan utama menurut jenis kelamin kabupaten dompu tahun 2022, persentase berusaha dengan total 41.84, laki-laki 50.16 dan perempuan 25.84. lebih banyak laki-laki yang berusaha sendiri dibandingkan perempuan. ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam kategori usaha sendiri, mungkin karena mereka memiliki lebih banyak akses atau kesempatan untuk memulai usaha. Persentase yang pekerja bebas dengan total 13.35, laki-laki 17.41 dan perempuan 5.5, hampir tiga kali lipat di bandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya peluang pekerjaan bebas yang tersedia untuk laki-laki atau adanya hambatan bagi perempuan untuk bekerja bebas. Persentase Buruh/Karyawan dengan total 25%, laki-laki 23.16% dan perempuan 28.53%. lebih banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan dibandingkan laki-laki. Ini bisa mengindikasikan bahwa perempuan lebih cenderung mencari pekerjaan dengan gaji tetap dan struktur kerja yang lebih formal dibandingkan dengan pekerjaan bebas atau berusaha sendiri. Persentase Pekerja keluarga dengan total 19.81%, laki-laki 9.28 dan perempuan 40.08. Lebih banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga dibandingkan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Dompu cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan keluarga dibandingkan laki-laki. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial dan budaya yang mengharapkan perempuan untuk lebih banyak berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal atau berusaha sendiri juga bisa menjadi alasan mengapa mereka lebih dominan dalam kategori pekerja keluarga. Peran perempuan sebagai pekerja keluarga juga mencerminkan bagaimana pembagian kerja berdasarkan gender masih sangat kental di masyarakat ini, di mana perempuan lebih banyak terikat pada pekerjaan yang tidak dibayar atau berupah rendah dalam lingkup keluarga.

Dalam penelitian ini kemiskinan di Kabupaten Dompu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja. Mengatasi kemiskinan di Kabupaten Dompu memerlukan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan

lapangan kerja. Dalam penelitian ini kemiskinan di Kabupaten Dompu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja. Mengatasi kemiskinan di Kabupaten Dompu memerlukan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan lapangan kerja.

SOLUSI PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN TERHADAP MASYARKAT

A. Menyelaraskan Rencana Prioritas Nasional dan Kabupaten Dompu Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan hasil musrenbang tahun 2022 dalam penyusunan RKPD tahun 2023 dengan tema **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dompu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan pelayanan public daerah dengan program prioritas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sector unggulan dengan program prioritas JARAPASAKA;
3. Peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan program prioritas pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program prioritas pengentasan stunting dan peningkatan kualitas pendidikan;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar daerah dengan program prioritas peningkatan kualitas jalan dan perluasan cakupan daerah pertanian yang beririgasi teknis,
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan program prioritas penanganan sampah dan peningkatan kualitas air;
7. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan program prioritas masyarakat Dompu berkarakter

Tabel 1.2. Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2024 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2024 Untuk Provinsi	Sasaran RPJMD Provinsi 2024	Sasaran Awal RKPD Provinsi 2024	Sasaran Awal RKPD Kabupaten Dompu 2024
1.	Tingkat Kemiskinan	6.50 - 7.50	12.50 - 12.85	12.37 - 12.70	12.37 - 12.70	11.6 - 11.8
2.	Pertumbuhan Ekonomi	5.3 - 5.7	6.3 - 6.6	5.8 - 7.1	5.8 - 7.1	5 - 6
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.99 - 74.02	70.37 - 70.56	70.97 - 71.08	70.97 - 71.08	70.5 - 70.8
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.00 - 5.7	2.54 - 3.26	2.53 - 2.55	2.53 - 2.55	2.0 - 2.25

No.	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2024 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2024 Untuk Provinsi	Sasaran RPJMD Provinsi 2024	Sasaran Awal RKPD Provinsi 2024	Sasaran Awal RKPD Kabupaten Dompu 2024
	(TPT)					
5.	Rasio Gini	0.374 - 0.377	0.370 - 0.372	0.297	0.297	0.295 - 0.305

Sumber : Bappeda, 2024

Penyelarasan prioritas pembangunan dari pembangunan nasional ke pembangunan daerah harus ditegakkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pencapaian target nasional dan daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tetap berada dalam batasan kerangka perencanaan nasional, penyelarasan pembangunan daerah tidak hanya mempertimbangkan strategi nasional. Kebijakan pemerintah provinsi harus selalu memandu keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dompu saat merumuskan kebijakannya. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan provinsi dan daerah bergerak ke arah yang sama.

B. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Adapun layanan dasar SPM seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal kewenangan kabupaten adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Bidang Pendidikan**, meliputi (1) Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Pendidikan Dasar, dan (3) Pendidikan Kesetaraan;
2. **Urusan Bidang Kesehatan**, meliputi (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil; (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) Pelayanan Kesehatan Balita; (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; (6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; (7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; (8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; (9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; (10) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; (11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis; (12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
3. **Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, meliputi (1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; (2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
4. **Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman**, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
5. **Urusan Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**, meliputi (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) Pelayanan informasi rawan bencana; (3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.; dan

6. **Urusan Bidang Sosial**, meliputi (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pada masing-masing Urusan SPM tersebut telah diatur tentang pedoman teknis pelaksanaannya oleh Kementerian terkait, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan pemenuhan target yang direncanakan disesuaikan dengan rencana target SPM.

Dapat kami laporkan capaian penerapan SPM Tahun 2022 adalah sebesar 65,75 dengan perincian per bidang SPM sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan, keterisian data 100 persen, capaian SPM 100 persen;
2. SPM Bidang Kesehatan, keterisian data 100 persen, capaian SPM 83,90 persen;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum, keterisian data 50 persen, capaian SPM 65,34 persen;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat, keterisian data 66,67 persen, capaian SPM 18,75 persen;
5. SPM Bidang Trantibumlinmas, keterisian data 92,59 persen, capaian SPM 64,44 persen;
6. SPM Bidang Sosial, keterisian data 90 persen, capaian SPM 62,06.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Dompu akan memprioritaskan penuntasan keterisian dan capaian SPM melalui penyediaan anggaran yang cukup, pendampingan dan memastikan sub kegiatan pendukung SPM telah dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Definisi tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan berdasarkan pengeluaran. Individu dikategorikan miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita bulanan mereka berada di bawah jumlah tertentu yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) membentuk garis kemiskinan, GKM adalah pengeluaran makanan minimum per kapita per hari, atau 2.100 kilokalori.

Kemiskinan diartikan sebagai “rendahnya taraf hidup banyak orang atau kelompok, dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini berlaku secara umum pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Profesor Emir Salim, kemiskinan berarti: “suatu kondisi yang digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar”. Terdapat beberapa ciri masyarakat miskin secara umum.

- a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (basic deprivation).
- b) Tidak berdaya dan tidak mampu menjalankan kegiatan usaha yang produktif (unproductivity).
- c) Ketidakmampuan mengakses sumber daya sosial dan ekonomi (inaccecibility).
- d) Tidak mampu atau tidak berdaya menentukan nasibnya sendiri, terus-menerus mengalami perlakuan diskriminatif, ketakutan, ketidakpercayaan, atau ketidakpedulian.
- e) Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no freedom for poor).

Hasil penelitian yang mengkaji dampak kemiskinan terhadap masyarakat di Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Kemiskinan di Kabupaten Dompu disebabkan oleh keterbatasan sumber

daya seperti, Terbatasnya akses terhadap infrastruktur, terbatasnya akses terhadap pasar, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Pembatasan ini mempersulit masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Dompu. Terbatasnya akses terhadap pendidikan berarti masyarakat tidak diberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Dompu. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan juga menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari bagaimana kemiskinan mempengaruhi akses ke pendidikan dan kualitasnya, bagaimana pendidikan dapat membantu mengatasi kemiskinan, bagaimana kemiskinan mempengaruhi peluang kerja dan aktivitas ekonomi, dan bagaimana peran sektor informal membantu ekonomi rumah tangga di Kabupaten Dompu. evaluasi lebih mendalam tentang seberapa efektif kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada dosen dan teman teman yang telah ikut berpartisipasi membantu dalam penyusunan serta keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan artikel ini, semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

REFERENSI

- Bappeda. (2022). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023*. 89.
- BPS. (2023). *Istilah Statistik - Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik*.
- Crystallography, X. D. (2016). *Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif*. 1-23.
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Dulkiah, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 8(2), 36-57.
- Fajriwati, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(2), 145-154. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150-155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Hendayani, B. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 75-83. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/59/19>
- Ibrahim, I., & Pratama, I. N. (2024). Impresi Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 1-14.

- Kartini. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK SISTEM APLIKASI DI LOMBOK TIMUR. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 44–51. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/56/14>
- keberhasilan-akj-syah-turunkan-angka @ www.topikbidom.com. (n.d.).
- Lalu Irwan Jayadi. (2023). DIGITAL E-GOVERNMENT PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 33–43. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/55/13>
- Moh.Nazir. (2005). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Nizar, F., & Arif, M. (2023). Pengaruh Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2021. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 48–58. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23599>
- Nurrahmania. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Mengadaikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Simpasai. In *Bussiness Law binus* (Vol. 7, Issue 2, pp. 33–48). etheses.uinmataram.ac.id.
- Pratama, Citra, Y. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tujuan dari penelitian ini ada. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 1–15.
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Prayoga, D. A., Hadi, A., & Pratama, I. N. (2023). MODAL SOSIAL MUKTI DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DUA PERIODE DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA. *Jurnal Ilmiah Aset*, 1(1), 19–32. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/MODAL+SOSIAL+MUKTI+DALAM+MEMENANGKAN+PEMILIHAN+KEPALA+DESA+DUA+PERIODE+DI+DESA+POHGADING+KECAMATAN+PRINGGABAYA+.pdf>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- profil-kabupaten-dompu @ www.aktualita.info. (n.d.).
- Su'amah. (2023). EVALUASI PENERAPAN KEUNGGULAN APLIKASI MYSAPK BKN DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Su'amah. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 84–97. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/60/20>
- SYAFITRI, E. R., & NURYONO, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling “Dialectical Behavior Therapy.” *Jurnal BK Unesa*, 53–59.
- Tri Yunarni, B. R., Mintasrihardi, M., & Setiawati, Y. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 193. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1276>